



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
#BROTOGETHER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

DIPA TA. 2025



Satker

**Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari**



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 032.03.2.537695/2025**



DS:4835-0117-8052-6345

Revisi ke 07

Tanggal : 16 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
 3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
 4. Kode>Nama Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
- Sebesar : Rp. 51.259.064.000 (LIMA PULUH SATU MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	18.338.156.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	4.594.908.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	28.326.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	28.326.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I	(060) Rp.	23.133.064.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	28.126.000.000
-----------------------	-----------	----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025



DS:4835-0117-8052-6345

Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp.	32.297.583.000
HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp.	32.263.573.000
HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp.	34.010.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	18.961.481.000
WA.2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Rp.	18.961.481.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



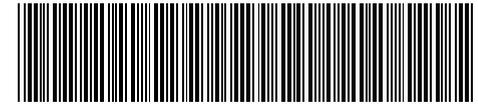
DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : I A. 1

Program	:	032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				32.297.583.000
Kegiatan	:	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				32.263.573.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		50.000.000
Rincian Output	:	01 ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	1,00	Rekomendasi Kebijakan		50.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	3,00	Lembaga		3.887.573.000
Rincian Output	:	01 BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	3,00	Lembaga		3.887.573.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1,00	Unit		28.326.000.000
Rincian Output	:	01 RBQ.004	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - Eco Fishing Port (PN)	1,00	Unit		28.326.000.000
Kegiatan	:	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan				34.010.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2341.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1,00	Lembaga		22.900.000
Rincian Output	:	01 QGA.001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional (PN)	1,00	Lembaga		22.900.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	2341.QKB	Pemantauan produk	200,00	laporan		11.110.000
Rincian Output	:	01 QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (PN)	200,00	laporan		11.110.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : I A. 2

Program	:	032.03.WA	Program Dukungan Manajemen			18.961.481.000
Kegiatan	:	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			18.961.481.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	707.335.000
Rincian Output	:	01	CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,00	Unit	707.335.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	17.820.566.000
Rincian Output	:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	17.000.000
		02	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	18.000.000
		03	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	17.785.566.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,00	Unit, m2, Paket	130.000.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	30.000.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	35.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,00	Layanan	35.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	268.580.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Layanan	75.000.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Layanan	39.000.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Layanan	154.580.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Lotharia Latif
NRP. 67060233

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	10.163.200	11.438.344	29.657.520	-	-	51.259.064		
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	-	3.437.398	28.860.185	-	-	32.297.583		
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	-	3.403.388	28.860.185	-	-	32.263.573		
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	50.000	-	-	-	50.000	20 . 51	
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	060@	
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	3.153.388	734.185	-	-	3.887.573	20 . 51	
04	PNBP	-	3.153.388	734.185	-	-	3.887.573	060@	
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	200.000	28.126.000	-	-	28.326.000	20 . 51	
02	PLN	-	200.000	-	-	-	200.000	060@	RK 11XEVV3A
02	PLN	-	-	28.126.000	-	-	28.126.000	140	PL 11XEVV3A
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	34.010	-	-	-	34.010		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2341.QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	22.900	-	-	-	22.900	20 . 51	
01	RM	-	22.900	-	-	-	22.900	060@	
2341.QKB	Pemantauan produk (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	11.110	-	-	-	11.110	20 . 51	
01	RM	-	11.110	-	-	-	11.110	060@	
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	10.163.200	8.000.946	797.335	-	-	18.961.481		
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.163.200	8.000.946	797.335	-	-	18.961.481		
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	-	707.335	-	-	707.335	20 . 51	
04	PNBP	-	-	707.335	-	-	707.335	060@	
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	10.163.200	7.657.366	-	-	-	17.820.566	20 . 51	
01	RM	10.163.200	7.657.366	-	-	-	17.820.566	060@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	40.000	90.000	-	-	130.000	20 . 51	
01 RM		-	40.000	90.000	-	-	130.000	060@	
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	35.000	-	-	-	35.000	20 . 51	
01 RM		-	35.000	-	-	-	35.000	060@	
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (20.51 SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI)	-	268.580	-	-	-	268.580	20 . 51	
01 RM		-	268.580	-	-	-	268.580	060@	
JUMLAH		10.163.200	11.438.344	29.657.520	-	-	51.259.064		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Lotharia Latif
NRP. 67060233

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (537695) PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	484.085	1.279.617	2.397.751	1.248.123	1.313.628	2.058.136	1.436.072	1.440.659	1.360.044	977.757	29.087.782	8.175.409	51.259.064
		BELANJA PEGAWAI	365.162	794.733	1.487.301	796.872	776.703	1.499.009	803.231	816.794	557.299	557.299	557.299	1.151.498	10.163.200
		BELANJA BARANG	118.923	484.884	910.451	451.251	536.925	559.127	628.791	542.915	802.745	420.458	404.482	5.577.391	11.438.344
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	4.050	80.950	0	0	28.126.000	1.446.520	29.657.520
	032.03.HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	0	0	281.295	16.864	118.145	133.028	222.956	96.541	146.241	48.190	28.155.306	3.045.008	32.263.573
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	281.295	16.864	118.145	133.028	222.956	96.541	146.241	48.190	29.306	2.310.823	3.403.388
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.126.000	734.185	28.860.185
	032.03.HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	0	0	1.924	0	0	0	0	0	3.163	1.534	0	27.389	34.010
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	1.924	0	0	0	0	0	3.163	1.534	0	27.389	34.010
	032.03.WA.2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	484.085	1.279.617	2.114.532	1.231.259	1.195.483	1.925.108	1.213.116	1.344.118	1.210.640	928.034	932.476	5.103.013	18.961.481
		51 BELANJA PEGAWAI	365.162	794.733	1.487.301	796.872	776.703	1.499.009	803.231	816.794	557.299	557.299	557.299	1.151.498	10.163.200
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	118.923	484.884	627.232	434.387	418.780	426.099	405.835	446.374	653.341	370.735	375.177	3.239.180	8.000.946
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	4.050	80.950	0	0	0	712.335	797.335
		PERKIRAAN PENERIMAAN	603.419	603.419	603.419	603.419	603.419	603.419	603.419	603.419	603.419	603.419	603.419	603.431	7.241.040
		- PNBP (425131)	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.375	16.456
		- PNBP (425151)	196.356	196.356	196.356	196.356	196.356	196.356	196.356	196.356	196.356	196.356	196.356	196.361	2.356.277
		- PNBP (425621)	405.692	405.692	405.692	405.692	405.692	405.692	405.692	405.692	405.692	405.692	405.692	405.695	4.868.307

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Lotharia Latif
NRP. 67060233

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [537695] PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	5.850.319
	52 Belanja Barang	Rp.	4.403.799
	53 Belanja Modal	Rp.	1.446.520
032.03.HB 2338	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	156.372
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	64.793
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	522141	Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	9.000
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	63.439
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	39.725
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	381.390
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
IV A. B L O K I R**



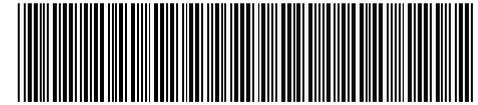
DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [537695] PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	TA 2025		TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.620
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 116.352
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi(PNBP)	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan(PNBP)	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179.849		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 669.901		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.235		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 309.185
	Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD		Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [537695] PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2338.RBQ	TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2341.QKB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.595 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	521211 Belanja Bahan(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.214 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 900 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 331 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.909 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.218 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.902 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pemantauan produk 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.646 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 745 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.440 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	2341.QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi		
	521211 Belanja Bahan(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [537695] PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
032.03.WA 2342 2342.CAN 2342.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.590 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Rp. 2.925 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.925 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Rp. 73.855 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.855 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Rp. 8.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM) Rp. 122.316 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 122.316 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Rp. 1.068.841 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.068.841 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Rp. 237.941 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 237.941 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP) Rp. 707.335 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 707.335 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Rp. 94.200 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 94.200 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Rp. 12.100 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.100 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Rp. 65.799 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.799 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521211 Belanja Bahan(RM) Rp. 63.301 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.301 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [537695] PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
2342.EBB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.675 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025	2342.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.898 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.250 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.596 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.500 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen Kinerja Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.379 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.500 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.700 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
2342.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen SDM Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.006 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.069 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [537695] PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

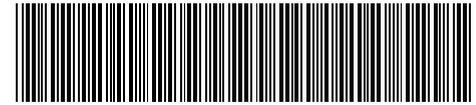
Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 918 Tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 226.427 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Lotharia Latif
NRP. 67060233

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.03.2.537695/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4835-0117-8052-6345

Kementerian Negara/Lembaga : [032] KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perikanan Tangkap
Provinsi : [20] SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : [537695] PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd.
Lotharia Latif
NRP. 67060233